

## A. Latar Belakang

Dalam perkembangannya hukum acara pidana di Indonesia dari dulu sampai sekarang ini tidak terlepas dari apa yang disebut sebagai pembuktian, apa saja jenis tindak pidananya pastilah melewati proses pembuktian. Didalam pembuktian pidana di Indonesia kita mengenal dua hal yang sering kita dengar yaitu alat bukti dan barang bukti disamping adanya proses yang menimbulkan keyakinan hakim dalam pembuktian. Istilah barang bukti dan alat bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan ( obyek delik ) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik misalnya pisau yang dipakai menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi itu merupakan barang bukti atau hasil delik.

Disamping itu ada pula barang bukti yang bukan merupakan obyek, alat atau hasil delik, tetapi dapat pula dijadikan barang bukti sepanjang barang tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana, misalnya pakaian yang dipakai korban pada saat ia dianiaya atau dibunuh. Untuk menjaga keamanan dan keutuhan benda tersebut undang-undang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penyitaan. Penyitaan mana harus berdasarkan syarat-syarat dan tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Sehingga dalam proses perkara pidana di Indonesia, barang bukti memegang peranan yang sangat penting. dimana barang bukti dapat membuat terang tentang terjadinya suatu tindak pidana dan akhirnya akan digunakan sebagai bahan pembuktian, untuk menunjang keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum didalam surat dakwaan di pengadilan.

Dalam pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman menegaskan bahwa tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Selanjutnya ketentuan tersebut di atas ditegaskan lagi dalam pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.<sup>1</sup>

Dalam penjelasan pasal 183 KUHAP ditegaskan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang. Adanya ketentuan tersebut sebagaimana pasal 183 KUHAP menunjukkan bahwa negara kita menganut sistem atau teori pembuktian secara negatif menurut undang-undang atau disebut *Sistem Negatif Wettelijk*, di mana hakim hanya dapat menjatuhkan hukuman apabila sedikit-dikitnya terdapat dua alat bukti dalam peristiwa pidana yang dituduhkan kepadanya. Walaupun alat-alat bukti lengkap, akan tetapi jika hakim tidak yakin tentang kesalahan terdakwa maka harus diputus lepas.

Pada sisi lain, dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung oleh satu alat bukti yang sah. Dengan kata lain, walaupun hanya didukung oleh satu alat bukti yang sah, dan hakim yakin atas kesalahan terdakwa maka terdakwa tersebut dapat dihukum. Dengan demikian hakim baru boleh menghukum seorang terdakwa apabila kesalahannya terbukti secara sah menurut undang-undang. Bukti-bukti itu harus pula

---

<sup>1</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 183

diperkuat dan didukung oleh keyakinan hakim. Jadi walaupun alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP terpenuhi, namun apabila hakim tidak berkeyakinan atas kesalahan terdakwa, maka terdakwa tersebut dapat dibebaskan. Hal ini sejalan dengan tugas hakim dalam arti menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan ( Pasal 1 butir 9 KUHAP )

Undang-undang selalu menempatkan keyakinan hakim sebagai suatu kunci terakhir dalam pemeriksaan pengadilan di persidangan. Keyakinan hakim memegang peranan yang tidak kalah pentingnya dengan upaya-upaya bukti yang diajukan dipersidangan, bahkan keyakinan hakim diletakkan oleh pembuat undang-undang di tingkat teratas. Karena berapa pun saja upaya bukti yang diajukan di persidangan mengenai suatu tindak pidana, kalau hakim tidak yakin atas kesalahan (kejahatan) yang dituduhkan kepada terdakwa, terdakwa tidak dapat dipidana (pasal 183 KUHAP), berarti dibebaskan atau setidaknya-tidaknya dilepaskan.

Dalam salah satu tindak pidana pembunuhan yaitu kasus pembunuhan Marsinah (buruh pabrik PT. Catur Putra Surya), pengadilan Negeri dan putusan Pengadilan Tinggi pada persidangan dengan terdakwa Mtr terdapat sedemikian banyak asas pembuktian yang telah dilewatkan oleh hakim bahkan cenderung untuk menselaraskan jalan cerita persidangan dengan dakwaan dari penuntut umum. Setidaknya hal ini terlihat dari putusan Mahkamah Agung terhadap terdakwa Mtr pada kasus yang sama dimana hakim pada Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang jauh berbeda dengan apa yang diputuskan oleh hakim pada pengadilan Negeri maupun hakim pada Pengadilan Tinggi

pada kasus ini terhadap terdakwa Mtr.<sup>2</sup> Putusan dalam kasus tersebut menunjukkan bahwa keyakinan hakim benar-benar menjadi kunci terakhir dalam putusan pengadilan di persidangan. Hal itu terlihat dari bagaimana banyaknya hakim melewatkan asas-asas pembuktian dalam menjatuhkan putusannya seperti yang disebutkan pada kasus di atas.

Faktor keyakinan itulah yang memberi bobot dan sekaligus ciri pada prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, peradilan yang bebas dan kebebasan hakim dalam mengenai perkara yang disidangkan. Untuk mendukung dan menguatkan alat bukti yang sah sebagaimana ditegaskan dalam pasal 184 ayat (1) KUHP, dan untuk memperoleh keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa, maka disinilah letak pentingnya barang bukti tersebut.

Dengan demikian bukan tersangka (pelaku tindak pidana) saja yang harus dicari atau ditemukan oleh penyidik, melainkan bahan pembuktiannya pun harus ditemukan pula. Hal ini mengingat bahwa fungsi utama dari hukum acara pidana adalah tidak lain dari pada merekonstruksi kembali kejadian-kejadian dari seorang pelaku dan perbuatannya yang dilarang, sedangkan alat-alat pelengkap dari pada usaha tersebut adalah barang bukti. Pelaku, perbuatannya, dan barang bukti merupakan suatu kesatuan yang menjadi fokus dari usaha mencari dan menemukan kebenaran materiil.

Barang bukti dalam tindak pidana pembunuhan menjadi penting karena dalam tindak pidana pembunuhan sering kali tidak ditemukan bukti-bukti yang lengkap, demikian juga saksi mata yang melihat kejadian tersebut. Begitu pentingnya barang bukti dalam tindak pidana pembunuhan maka penyidik harus sebisa mungkin mendapatkan

---

<sup>2</sup> <https://ferli1982.wordpress.com/2011/05/07/analisa-hasil-putusan-pengadilan-pada-kasus-pembunuhan-marsinah/>. Diakses pada tanggal 13 Januari 2016 20:18 wita.

barang bukti di tempat kejadian perkara (TKP), karena pengungkapan perkara tersebut berawal dari adanya barang bukti yang ditemukan dan kemudian disita oleh penyidik. Dalam prakteknya, penyitaan barang bukti juga terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Barang bukti dalam tindak pidana pembunuhan adalah mayat manusia, dalam hal ini tentunya dalam menangani perkara pembunuhan perlu ketentuan-ketentuan khusus yakni dalam hal penyitaan barang bukti apakah harus menunggu izin dari ketua pengadilan negeri setempat atau tidak, karena dikhawatirkan barang bukti dan lokasi di tempat kejadian perkara akan berubah atau bahkan hilang apabila tidak dilakukan tindakan oleh penyidik. Terkait dengan hal tersebut, peneliti mengambil judul “Kedudukan Barang Bukti Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pembunuhan di Pengadilan Negeri Barru”

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dan diuraikan dalam penulisan skripsi ini maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur penyitaan dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Namun tanpa adanya surat izin penyitaan dalam perkara pembunuhan penyidik dapat langsung menyita barang bukti dalam perkara pembunuhan, karena penyitaan dalam perkara pembunuhan termasuk keadaan yang sangat perlu dan mendesak sehingga penyidik tidak memerlukan surat izin penyitaan terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri Barru, dari hasil penyitaan tersebut penyidik wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Barru guna memperoleh surat penetapan persetujuan penyitaan terhadap barang bukti dari Ketua Pengadilan Negeri Barru

2. Kedudukan barang bukti hanyalah sebagai pendukung alat bukti semata, namun barang bukti mempunyai peranan terhadap putusan pengadilan dalam perkara pembunuhan di Pengadilan Negeri Barru yaitu sebagai pertimbangan keyakinan yang menguatkan bagi hakim, tapi tidak menentukan putusan pengadilan/ vonis terhadap terdakwa.